

ABSTRAK

Abd Rahim Rahmat. 2026. *Implementasi Kebijakan Energi Terbarukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan* (dibimbing oleh Nur Wahid dan Rudi Hardi).

Implementasi kebijakan energi terbarukan di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan dalam menerjemahkan kerangka regulasi ke dalam pelaksanaan program yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan energi terbarukan di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Tahun 2021–2050. Penelitian ini berfokus pada peran dan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Selatan terkait tata kelola transisi energi daerah. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, yang dianalisis secara interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan energi terbarukan di Provinsi Sulawesi Selatan belum berjalan secara optimal. Pada aspek komunikasi, masih terdapat hambatan transmisi informasi di tingkat masyarakat yang menyebabkan kejelasan kebijakan bersifat elitis dan teknokratis. Dari sisi sumber daya, implementasi kebijakan terkendala oleh keterbatasan anggaran, kekurangan sumber daya manusia teknis, serta penggunaan data potensi energi terbarukan yang belum mutakhir dan terintegrasi, sehingga membatasi daya tarik investasi sektor swasta. Meskipun disposisi pelaksana menunjukkan komitmen dan sikap yang relatif positif, efektivitas implementasi kebijakan tereduksi oleh struktur birokrasi yang terfragmentasi, khususnya akibat pembagian kewenangan pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain itu, ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) teknis menyebabkan pelaksanaan program energi terbarukan cenderung bersifat jangka pendek dan berorientasi proyek, tanpa mekanisme keberlanjutan yang jelas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan implementasi kebijakan energi terbarukan memerlukan reposisi masyarakat sebagai subjek informasi, penguatan basis data yang akurat dan layak investasi, serta sinkronisasi tata kelola antara pemerintah pusat dan daerah guna menjamin keberlanjutan transisi energi di tingkat daerah.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Energi Terbarukan, Dinas ESDM; Rencana Umum Energi Daerah (RUED); Sulawesi Selatan.